



ABSTRAK

Skripsi ini membahas bagaimana diplomasi Indonesia berkembang dari *state-centric* dan pendekatan historis yang fokus pada stabilitas dan pertumbuhan ekonomi, menuju kepada tantangan diplomasi air yang kompleks dan bersifat lintas batas, muti-sektor serta multi aktor. Pada dasarnya Indonesia dikaruniai kekayaan alam yang melimpah, akan tetapi air permukaan hanya mencukupi 73% dari kebutuhan untuk masyarakat dan pembangunan. Ketidakseimbangan tersebut diperparah dengan adanya ancaman perubahan iklim global yang mengubah pola hidrologi di seluruh daerah, serta memerlukan tata kelola air yang lebih efektif. Berdasarkan teori *linkage politics* yang dikemukakan Rosenau, penguatan tekanan domestik dan pengaruh internasional, telah membuat Indonesia melakukan perubahan fokus dalam praktik politik luar negeri, yaitu dari praktik yang secara historis berpaku pada stabilitas regional untuk menjamin pertumbuhan ekonomi serta kedaulatan nasional, menuju praktik diplomasi yang melibatkan isu sumber daya air. Praktik diplomasi air ini memerlukan kolaborasi dengan aktor *non-state*, seperti pakar di bidang sains, masyarakat madani serta komunitas akademisi agar Indonesia bisa lebih baik dalam menangani isu air global. Pergeseran praktik diplomasi ini sangat jelas ditunjukkan dari aksi dan keterlibatan Indonesia dalam insiatif renasionalisasi PAM Jaya karena adanya tekanan masyarakat madani, sampai dengan peran aktif Indonesia dalam menandatangani *Paris Agreement*. Pada esensinya, *linkage* ini menunjukkan bagaimana politik luar negeri saat ini cenderung mengikuti tren yang mengemuka dalam opini internasional, sekaligus menjadi media uji besar kecilnya kekuatan dari cara suatu negara merespon tren tersebut. Untuk agenda “*non-high politics*” (seperti isu lingkungan), partisipasi dari aktor *non-state* sudah jamak dilakukan.

Kata kunci: perubahan iklim global, diplomasi air, *linkage politics*, praktik diplomasi, aktor *non-state*



ABSTRACT

In this paper, we will discuss how Indonesian diplomacy evolved from state-centric and traditional approaches that focus on stability and economic growth to more complex water challenges into a new model that addresses trans-boundary, multi-sectoral, and multi-actor issues, known as water diplomacy. Indonesia is richly endowed with natural resources, yet surface water supplies meet only 73% of the total required water supply for the nation. This imbalance has been compounded by the effects of global climate change that intensify extreme weather events and modify hydrological patterns across the country and has raised the needs of adaptive approach to water governance. Based on Rosenau's linkage politics, these compelling domestic pressures and international influences have led Indonesia to refocus its approach to different foreign policy orientation: from one that historically deals primarily with regional stability to ensure domestic economic growth and state sovereignty toward one that involves in water related foreign policy that engages more collaboratively with non-state actors, such as scientific experts and local communities, in ways that are better able to address global issues. This shift is becoming more apparent in recent actions and engagements by Indonesia; from domestic initiatives such as remunicipalizing PAM Jaya through to active participation in international agreements, such as the Paris Agreement. In essence, these linkages demonstrate how a country's foreign policy is increasingly influenced by global issues that test national power, alongside the growing force of non-state actors in areas traditionally considered outside "high politics" (like water issue).

Key words: *global climate change, water diplomacy, linkage politics, foreign policy, non-state actors*